

**ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN AKIBAT
DARI PROYEK PEMBANGUNAN JEMBATAN PEMERINTAH
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022)**

ALAMSYAH^{*}

Dr.IBNU AFFAN,SH.,M.Hum^{}**

Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum^{*}**

ABSTRAK

Kerusakan lahan dapat dirujuk dengan berbagai aspek, seperti penurunan kapasitas lahan bagi produksi, kestabilan tanah, tata air, udara atau habitat flora dan fauna. Akibat dari kerusakan lahan ini juga tidak terbatas pada lahan tempat kerusakan itu terjadi, akan tetapi dapat menyebar mengenai tapak-tapak yang berada di luarnya.

Permasalahannya adalah bagaimana aturan pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah jika menggunakan lahan masyarakat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, bagaimana tanggung jawab atas tindakan perusakan lahan tanah milik pribadi dalam pembangunan proyek jembatan pemerintah serta bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan perusakan lahan tanah untuk membangun jembatan pemerintah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 451 K/Pid/2022.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier", dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Dari hasil penelitian bahwa. Tanggung jawab atas tindakan perusakan lahan tanah milik pribadi dalam pembangunan proyek jembatan pemerintah di Gampong Teupin Keube Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara antara lain dengan Menyiapkan SDM yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Perusakan, Proyek Pembangunan

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

^{**} Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

^{***} Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

**LEGAL ANALYSIS OF ACTS OF LAND DESTRUCTION RESULTING
FROM GOVERNMENT BRIDGE CONSTRUCTION PROJECT
(Study of Supreme Court Decision Number 451 K/Pid/2022)**

ALAMSYAH^{*}

Dr.IBNU AFFAN,SH.,M.Hum^{**}

Dr.MUKIDI,SH.,SE.,M.Hum^{***}

ABSTRACT

Land damage can be referred to by various aspects, such as reduced land capacity for production, soil stability, water management, air or flora and fauna habitat. The consequences of land damage are also not limited to the land where the damage occurred, but can spread to sites outside it.

The problem is what are the rules for implementing government development projects if using community land according to statutory provisions, what are the responsibilities for destroying privately owned land in the construction of government bridge projects and what are the judges' considerations for acts of destroying land to build government bridges in the Court's decision Agung Number 451 K/Pid/2022.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

From the results of the study that. Responsibility for the destruction of privately owned land in the construction of a government bridge project in Gampong Teupin Keube, Matang Kuli District, North Aceh Regency, among others, by preparing human resources capable of participating in development, that in this way the Banda Aceh High Court Decision which amends the Lhoksukon District Court Decision must amended regarding the sentence imposed on the Defendant. because the Defendant was convicted, he was burdened with paying court costs at the cassation level.

Keywords: Legal Analysis, Destruction, Development Projects

^{*} Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

^{**} Dosen Pembimbing I Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU

^{***} Dosen Pembimbing II Penulis Pada Penulisan Tesis DI Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU